

LITERACY HUB (L-HUB): STUDI STRATEGI LITERASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA BAUBAU)

LITERACY HUB (L-HUB): STUDY OF LOCAL GOVERNMENT LITERACY STRATEGIES (CASE STUDY IN THE CITY OF BAUBAU)

Herie Saksono

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri,
Jl. Kramat Raya No. 132, Senen – Jakarta, Indonesia.
e-mail: herie.saksono26@gmail.com

Diserahkan: 19/04/2020; Diperbaiki: 22/05/2020; Disetujui: 29/05/2020

Abstrak

Literasi masih menjadi problematika di beberapa daerah. Perkembangan zaman telah merubah spektrum literasi, sehingga literasi tidak sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Hasil pengukuran berbagai institusi internasional membuktikan betapa terpuruknya kondisi literasi. Literasi harus dikelola secara kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Budaya literasi pun dikembangkan pemangku kepentingannya. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi literasi di daerah, menghadirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menginisiasi *extraordinary agenda* literasi, dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ketersediaan ruang aktualisasi budaya literasi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan literasi di daerah dengan metode studi kasus di Kota Baubau. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, sedangkan data sekunder didapatkan melalui data/informasi dan dokumen serta penelusuran internet. Disimpulkan bahwa literasi perlu ditata kembali, Pemerintah dan pemerintah daerah hadir melalui *extraordinary agenda* literasi, dan menyediakan ruang aktualisasi literasi. Direkomendasikan agar Pemerintah Kota Baubau menginisiasi *Literacy Hub* (L-Hub) sebagai akselerator pengembangan budaya literasi dengan mengedepankan peran aktif dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Selain itu, diciptakan iklim kondusif yang mendukung ekosistem literasi dan pembiasaan berliterasi sebagai gaya hidup demi terciptanya generasi literat yang mempercepat terwujudnya kota literasi.

Kata Kunci: *Literacy Hub*, Literasi, dan Pemerintah Daerah.

Abstract

In some regions, literacy still a problem. The times have changed the spectrum of literacy so that literacy is not merely the ability to read, write, and count. The measurement results of various international institutions prove how worse the condition of literacy. Literacy must be managed collaboratively between the Government, Local Government, and the community. Literacy culture was developed by its stakeholders. This study aims to describe the condition of literacy in the region, presenting the Government and Local Governments to initiate an extraordinary literacy agenda and to give an understanding to the public about the availability of literacy culture actualization space. A descriptive qualitative approach is used to describe literacy in the regions with the case study method in the City of Baubau. Primary data were obtained from in-depth interviews, while secondary data were obtained through data/information and documents and internet searches. It was concluded that literacy needs to be reorganized, the Government and regional governments are present through the extraordinary literacy agenda, and provide space for literacy actualization. It is recommended that the City Government of Baubau initiate a Literacy Hub (L-Hub) as an accelerator in the development of literacy culture by promoting an active role and collaboration among community elements. Also, a conducive

climate was created that supports the literacy ecosystem and literacy habit as a lifestyle for the creation of a literate generation that accelerates the realization of a literacy city.

Keywords: *Literacy Hub, Literacy, and Local Government.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah administrasi pemerintahan 34 provinsi, 416 kabupaten (termasuk 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu), dan 98 kota (termasuk 5 Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta). Saat ini penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah diatur secara khusus tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Maknanya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan 34 Daerah Provinsi dan 415 Daerah Kabupaten dan/atau 93 Daerah Kota (Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014). Dalam upaya mengakselerasi terselenggaranya budaya literasi, kepada pemerintah daerah dibagikan urusan pemerintahan bidang perpustakaan. Secara lebih rinci diuraikan pada Sub Urusan Pembinaan Perpustakaan, dimana kepada daerah provinsi diberikan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi, sedangkan kepada daerah kabupaten/kota diberikan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca pada tingkatan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (2) huruf q UU No. 23 Tahun 2014). Artinya daerah memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan bidang perpustakaan, khususnya melalui kegiatan pembudayaan gemar membaca. Harapannya, semakin intensif pembudayaan gemar membaca di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota akan menumbuhkan budaya literasi dan mempercepat terciptanya generasi literat. Berkembangnya budaya literasi bermanfaat sebagai acuan bagi penataan

regulasi/kebijakan, formulasi strategi kemajuan pembangunan daerah, peningkatan kualitas kehidupan, dan penyelenggaraan pembangunan manusia di pusat-daerah.

Pertanyaan kritisnya, mengapa kita masih terbelit problema literasi? Hasil pengukuran tingkat literasi yang diselenggarakan beberapa lembaga internasional membuktikan semakin lemahnya keberaksaraan di Indonesia. Beberapa pemberitaan yang terkait dengan kualitas literasi, antara lain: 1) Tingkat literasi penduduk Indonesia kelompok usia 15-24 tahun 99,67%, kelompok usia 15-65 tahun 95,38%, dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 70,06%. Sementara itu, penduduk yang masih buta huruf (*illiterate*) pada kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 147.590 orang, penduduk buta huruf berusia 15 tahun ke atas secara keseluruhan berjumlah 8.723.298 orang (Institute for Statistics, UNESCO 2016); 2) Hasil Tes OECD *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2015 sebagai agenda 3 (tiga) tahunan literasi matematika, membaca, dan sains menempatkan Indonesia di peringkat ke-62 dari 70 negara yang disurvei. Efeknya, Indonesia masuk dalam jajaran negara berkualitas sains terendah dengan skor 403, membaca dengan skor 397, dan matematika dengan skor 386 (OECD 2018); dan 3) Tingkat melek huruf (*literacy rate*) hanya sebesar 93,0% pada akhir tahun 2018 yang menempatkan Indonesia di urutan ke-106 dari 197 negara (Burton 2018).

Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami permasalahan buta huruf. Bila dicermati persentase penduduk buta huruf menurut provinsi di Indonesia seolah jumlahnya relatif kecil. Namun bila diakumulasi dari setiap provinsi semakin jelas bahwa jumlah penduduk buta huruf mencapai 40.985.926 orang (BPS 2018) sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Penduduk Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2017

Jumlah Penduduk & Kelompok Usia	Persentasi Penduduk Buta Huruf (PBH)					CAGR (%)	Indonesia 2017
	2013	2014	2015	2016	2017		
Jumlah Penduduk	2.360.611	2.448.081	2.499.540	2.551.008	2.602.389	2,47	261.890.900
Usia > 15 Tahun	07,39	0,28	0,27	0,26	0,26	-56,69	04,50
Usia 15-44 Tahun	02,05	0,09	01,37	01,19	01,14	-13,64	0,07
Usia > 45 Tahun	21,38	17,10	17,07	0,72	16,41	-6,40	11,08
Total Persentase	30,82	17,47	18,71	2,17	17,81	-12,81	15,65
Jumlah PBH	727.540	427.680	467.664	55.357	463.485	-10,66	40.985.926

Sumber: *Persentase Penduduk Buta Huruf di Indonesia. BPS. Data diolah 2018.*

Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2018. BPS Prov. Sulra. Data diolah 2018.

Keterangan: CAGR = *Compound Annual Growth Rate (Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan).*

Tabel 1 menginformasikan adanya persoalan krusial di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni penduduk buta huruf. Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi penurunan persentase penduduk yang mengalami buta huruf. Namun, persentase penduduk buta huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 17,81% dan berada di atas angka rata-rata nasional (15,65%). Pada tahun 2017, persentase kelompok penduduk usia > 15 tahun yang mengalami buta huruf lebih kecil jumlahnya dibandingkan angka rata-rata nasional, yakni hanya 0,26%. Ironisnya, pada kelompok penduduk berusia diantara 15-44 tahun, persentasenya mencapai 01,14% atau lebih besar daripada angka rata-rata nasional (0,07%). Begitu pula halnya dengan kelompok penduduk berusia > 45 tahun yang mencapai 16,41% dari jumlah penduduk, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,08%. Menurut Gilbert, *et al.* (2018) dalam *A National Literacy Trust Research Report 2018*, melek huruf yang rendah terkait dengan ketidaksetaraan dalam kesehatan mental, kesejahteraan ekonomi, kehidupan keluarga, keterlibatan masyarakat dan kejahatan. Persentase penduduk buta huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 17,81% dari total penduduk yang mencapai 2.602.389 orang. Hingga akhir tahun 2017 masih terdapat 463.485 orang buta huruf yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Istilah literasi pada umumnya mengacu pada kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis. Artinya, seorang yang literat adalah orang yang telah menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa (Gustini *et al.* 2016). Seiring pesatnya kemajuan

teknologi, pengertian literasi pun mengalami pengembangan dan semakin komprehensif. Apriani (2016) menegaskan bahwa definisi literasi dari masa lalu tidak dapat mengakomodasi cara-cara baru dalam membuat makna, seperti mencari informasi di berbagai modalitas, berpartisipasi dalam konferensi audio-visual, menanggapi email, lingkungan virtual, atau membuat situs web pribadi, blog, atau wiki. Pembaca tidak lagi terbatas pada hanya *decoding* dan memahami kata yang dicetak. Mereka perlu merespons dan mengkritik teks dan memahami informasi dari sumber yang mereka dapatkan.

Mengacu perspektif budaya literasi, Haryanti (2014) memberi makna budaya literasi sembari menegaskan pentingnya budaya literasi. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca, budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir memperluas pengertian literasi sebagaimana diungkap dalam *The Education World Forum 2018: Global Summit for Education Minister* di London, 22-24 Januari 2018. Beliau menyatakan bahwa literasi lama yang mengandalkan baca, tulis, dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi. Dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten pada masa depan, 3 (tiga) literasi baru harus segera diterapkan, yakni: literasi data (*data literation*), literasi teknologi

(*technology literation*), dan literasi manusia (*human literation*). Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi dari data besar (*big data*) dalam dunia digital. Literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja, seperti *coding*, *artificial intelligent* (AI), dan prinsip teknik rekayasa (*engineering principles*). Adapun literasi manusia (SDM) adalah dalam bidang kemanusiaan, komunikasi, dan desain (rancangan) yang perlu dikuasai oleh semua lulusan sarjana di Indonesia. Dalam konteks literasi manusia, strategi yang harus diterapkan kepada generasi penerus adalah mereka harus mampu berinteraksi dengan baik, tidak kaku, dapat melakukan pendekatan kemanusiaan dengan melaksanakan komunikasi yang baik, berbobot, dan juga harus menguasai desain kreatif dan inovatif.

Adapun mengenai manajemen literasi tidak banyak literatur yang membahasnya. Brauer dalam Webinars (2010) yang dipublikasikan oleh Roth, SWITCH (2015) menyatakan "*literacy management stands for an emerging professional field at the intersection of literacy research, pedagogy of reading and writing, instructional design, and institutional development. The demand for literacy managers is growing rapidly due to a profound transition from the so-called information age to the so-called knowledge age*". Sementara Katrin Girgensohn dalam Brauer (2010) menyatakan "*literacy management in my profession means to educate peer writing tutors in the writing center*". Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa manajemen literasi mengelola aspek administrasi, teknik-operasional, dan manajerial. Secara administratif, dikreasikan ekosistem literasi melalui regulasi/kebijakan untuk memperkuat tata kelola literasi. Secara teknis-operasional, didorong terciptanya iklim kondusif berliterasi melalui pendampingan penulis dan pembaca dengan memanfaatkan mitra kerja dan jejaring (*networked*). Secara manajerial, aktivitasnya difokuskan pada pembangunan manusia, penganggaran, pengelolaan metode/strategi, optimasi sarana-prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukungnya,

penetrasi pasar, dan penumbuhan motivasi literasi.

Manajemen literasi adalah proses mengelola penulisan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebutuhan untuk membangkitkan niat, aktualisasi diri, dan mengolah data/informasi agar tercipta perubahan dan karya futuristik. Karenanya, kemampuan membaca dan menulis menjadi sangat penting untuk menciptakan filosofi kehidupan dalam perspektif masa depan. Dalam perspektif evolusi kebudayaan, khususnya mengenai perubahan budaya dan perubahan masyarakat, Inglehart (2018) menyatakan bahwa budaya adalah seperangkat norma dan keterampilan yang kondusif untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu, yang merupakan strategi bertahan hidup bagi masyarakat. Amaliah (2010) mengartikan budaya adalah pikiran, akal budi, hasil adat-istiadat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Buruknya tingkat literasi memerlukan pembenahan. Definisi iterasi dalam kajian ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan manusia berupa konsumsi baca, tulis, berhitung, dan pemenuhan standar kehidupan lainnya agar seseorang lebih terampil, kreatif, inovatif, berpengetahuan, dan berkarakter, sehingga mampu beradaptasi dan menghasilkan sumberdaya terbarukan demi kemajuan hidupnya. Kondisi tingkat literasi mengindikasikan belum adanya *roadmap* pengembangan budaya literasi yang disusun Pemerintah bersama pemda. Berdasarkan fenomena tersebut, kajian ini hendak mengungkap dinamika dan problema literasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Baubau. Melalui pembenahan manajemen literasi secara komprehensif diharapkan tercipta solusi pengembangan budaya literasi.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Ruang lingkup kajian difokuskan kepada dinamika dan problematika literasi (melek huruf) dan/atau iliterasi (buta huruf) di Kota Baubau. Data primer diperoleh diskusi/wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber baik secara langsung ataupun dilanjutkan secara elektronik/*online*.

Data sekunder berupa literatur, dokumentasi, dan regulasi/kebijakan yang dikumpulkan melalui penelusuran internet (*data browsing*). Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yakni: i) reduksi data; ii) penyajian data; dan iii) penarikan kesimpulan/verifikasi. Pembahasannya diperkuat beberapa konsep/teori tentang literasi, manajemen, dan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kewilayahan Terkini

Pemilihan Kota Baubau sebagai studi kasus didasari pertimbangan antara lain: a) secara historis, Kota Baubau merupakan eks Kerajaan Buton yang memiliki budaya literasi tinggi. (masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332 sampai pertengahan abad ke-16 dan masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada 948 H (1542 Masehi) (Hidayatun 2010); b) Kota Baubau memiliki kekayaan budaya dan mewarisi nilai-nilai kesejarahan melalui aksara, aneka manuskrip, naskah-naskah, pustaka, dan peraturan pemerintahan serta adat istiadat sebagaimana hasil studi Ilyas (2018) yang mendeskripsikan 6 (enam) fase perkembangan tulis-menulis pada masa pemerintahan Kerajaan Wolio hingga bertransformasi menjadi Kesultanan Buton: Fase Raja Wolio V, Fase Raja Wolio VI, Fase

Sultan Buton IV, Fase Sultan Buton XXVI, Fase Sulton Buton XXIX, dan Fase Sultan Falihi 1937-1960. Selain itu, pada masa Sultan Buton IV (1597-1631), terjadi perubahan yang signifikan dalam tradisi dan sistem sosial budaya masyarakat Buton yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton (Purwanto 2018); c) Kota Baubau terletak di satu pulau tersendiri, yakni Pulau Buton yang terpisah dari daratan utama Provinsi Sulawesi Tenggara; d) Kota Baubau merupakan daerah otonom berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Bau-Bau pada tanggal 21 Juni 2001; dan e) Kota Baubau merupakan wilayah kepulauan yang pembangunannya harus berorientasi inovasi, partisipasi masyarakat, optimalisasi sumberdaya di sekitarnya, dan penggunaan teknologi yang berbasis budaya dan kearifan lokal. (Saksono 2013).

Kondisi yang disorot dan berimplikasi terhadap literasi adalah fasilitas pendidikan berupa sekolah, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Eksistensi sekolah sebagai fasilitas pendidikan dengan berbagai aktivitasnya berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan literasi di Kota Baubau. Data fasilitas Pendidikan menurut kecamatan di Kota Baubau disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan Di Kota Baubau Tahun 2017

No	Kecamatan (Kelurahan)	Orbitasi (Km)	Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan/Sederajat ^{*)}								Jumlah Sekolah
			TK	RA/BA	SD	MI	SMP	MTs	SMA/SMK	MA	
1.	Betoambari (5)	1,5	TAD	TAD	8	1	2	TAD	4	1	16
2.	Murhum (5)	4,5	TAD	TAD	9	2	6	TAD	6	1	24
3.	Batupoaro (6)	6,2	TAD	TAD	10	-	-	TAD	-	-	10
4.	Wolio (7)	6,4	TAD	TAD	13	2	5	TAD	3	1	24
5.	Kokalukuna (6)	13,3	TAD	TAD	10	1	2	TAD	1	-	14
6.	Sorawolio (4)	18,7	TAD	TAD	5	1	2	TAD	2	1	11
7.	Bungi (5)	19,0	TAD	TAD	5	1	4	TAD	2	1	13
8.	Lea-lea (5)	23,6	TAD	TAD	7	3	2	TAD	1	1	14
Σ Kota Baubau (43)			69	26	67	11	23	9	19	6	230

Sumber: Kota Bau Bau Dalam Angka (KBDA) 2018, BPS Kota Bau Bau. Data diolah 2018.

Catatan: ^{*)} TK = Taman Kanak-kanak; RA = Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal; SD = Sekolah Dasar; MI = Madrasah Ibtidaiyah; SMP = Sekolah Menengah Pertama; MTs = Madrasah Tsanawiyah; SMA/SMK = Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan; MA = Madrasah Aliyah; TAD = Tidak Ada Data.

Kota Baubau memiliki luas wilayah 249,99 km² yang terbagi atas 43 kelurahan dalam 8 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat fasilitas pendidikan mulai TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, kecuali di Kecamatan Batupoaro yang tidak memiliki fasilitas pendidikan MI, SMP, dan SMA/SMK/MA. Kecamatan Kokalukuna pun belum memiliki fasilitas pendidikan MA. Secara orbitasi, Kecamatan Lea-lea terletak paling jauh dari ibukota Kota Baubau di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari. Hingga akhir 2017 telah tersedia 230 sekolah di Kota Baubau. Tentunya tidak termasuk sekolah TK/RA/BA, dan MTs yang belum terdata (TAD).

Kesungguhan membangun budaya literasi berdampak terhadap peningkatan 5E (*The Five E's*). Kelima E tersebut, yakni: (1)

Education (pendidikan dan pengetahuan); (2) *Enjoyment* (kegembiraan/kenikmatan); (3) *Enlightenment* (pencerahan); (4) *Enrichment* (pengayaan); dan (5) *Entertainment* (hiburan). Pada era milenial, pengembangan literasi didasarkan metode termutakhir sesuai perkembangan zaman agar mampu menghadirkan kegembiraan masyarakat ketika berliterasi. Literasi ditengarai mampu memberikan pencerahan dan penerangan terhadap suatu kejadian/peristiwa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Kontinuitas berliterasi akan membentuk individu yang lebih intelek, edukatif, kreatif, dan inovatif. Terbukanya akses pekerjaan akan mereduksi pengangguran terbuka, bahkan merubah status sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Kondisi edukasi penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Baubau ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Di Kota Baubau Tahun 2017

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja				Jumlah	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
		Bekerja	(%)	PT ^{a)}	(%)			
1.	Tidak/Belum & Tamat SD	13.471	95,61	618	4,39	14.089	3.017	17.106
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6.747	98,05	134	1,95	6.881	9.415	16.296
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	14.770	90,31	1.584	9,69	16.354	11.765	28.119
4.	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	5.693	86,86	865	13,20	6.554	3.259	9.813
5.	Diploma I/II/III	4.385	98,36	73	1,64	4.458	1.428	5.886
6.	Universitas	20.477	92,28	1.713	7,72	22.190	1.467	23.657
JUMLAH		65.543	92,93	4.987	7,07	70.530	35.438	105.968

Sumber: Kota Baubau Dalam Angka (KBDA) 2018, BPS Kota Baubau. Data Diolah 2018.

Keterangan: (%) = persentase dari angkatan kerja yang bekerja & pengangguran terbuka; PT = Pengangguran Terbuka.

Hingga akhir 2017, angkatan kerja di Kota Baubau didominasi penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kategori Tidak/Belum dan Tamat SD. Jumlahnya mencapai 14.089 orang atau 19,98% dari total angkatan kerja sebanyak 70.530 orang. Begitu pula dominasi serapan tenaga kerja adalah mereka yang berstatus Tidak/Belum dan Tamat SD, SMP, SMA, dan SMK sejumlah 40.681 orang atau 57,68% dari jumlah angkatan kerja. Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya pengangguran terbuka yang didominasi penduduk berlatar pendidikan Tidak/Belum dan Tamat SD,

SMP, SMA, dan SMK sebanyak 3.201 orang atau 64,19% dari jumlah pengangguran terbuka di Kota Baubau yang mencapai 4.987 orang. Angkatan kerja penyandang status diploma hanya 4.385 orang atau 6,69%, sedangkan yang berpendidikan sarjana mencapai 20.477 orang atau 31,24% dari jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Deskripsi keadaan angkatan kerja tersebut menggugah kesadaran kolektif untuk segera membudayakan literasi melalui penataan kembali tata kelola literasi di Kota Baubau. Literasi menuntut keterlibatan dan andil berbagai pihak, terutama sekolah,

keluarga, dan masyarakat. Penataan manajemen literasi pemda menjadi suatu keniscayaan yang mampu mendorong dan mengakselerasi kesiapan SDM. Bonus demografi di setiap daerah harus segera diadaptasi agar mampu mengelola Revolusi Industri 4.0 beserta dampaknya. Manajemen literasi dilakukan secara kolaboratif melalui pelibatan lembaga/institusi pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) baik negeri maupun swasta termasuk para pemangku kepentingan literasi. Tujuannya membudayakan literasi, membentuk habitus literasi, menghasilkan generasi literat yang berintegritas, dan mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Pengelolaan literasi secara professional yang diawali dari masing-masing pemda akan berakumulasi menjadi keberhasilan literasi Indonesia.

Dinamika Literasi Dalam Regulasi/Kebijakan

Kepedulian Pemerintah terhadap literasi terefleksi dari regulasi/kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan literasi. Regulasi/kebijakan tersebut meliputi: Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PMPK). Tidak semua regulasi/kebijakan menyebutkan secara eksplisit kata literasi apalagi mencantulkannya sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Hal ini terlihat dari penggunaan/penyebutan kata “literasi/pengembangan budaya literasi” atau kata “membaca/kegemaran membaca” yang diadopsi regulasi/kebijakan sebagaimana sampel regulasi/kebijakan yang disajikan Tabel 4.

Tabel 4. Regulasi/Kebijakan Sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Literasi

Regulasi	NSPK dan/atau Mandatori Penyelenggaraan Literasi	Ketentuan Pengaturan
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	a. sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; b. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.	Konsideran Menimbang Pasal 4 ayat (5)
UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Pemerintah berkewajiban: menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu; serta penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, <i>mall</i>).	Pasal 4 Pasal 7 ayat (1) huruf e Pasal 8 huruf d Pasal 48 ayat Pasal 50 Penjelasan Pasal 48 ayat (4)
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui program Pembudayaan gemar membaca .	Pasal 233
UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global; Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara	Konsideran Menimbang huruf b Pasal 1 Angka 4

Regulasi	NSPK dan/atau Mandatori Penyelenggaraan Literasi	Ketentuan Pengaturan
	<p>kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.</p> <p>Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan: menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia.</p> <p>Pemerintah (setiap jenjang) berwenang Menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi.</p> <p>Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan</p>	<p>Pasal 4 huruf c</p> <p>Pasal 35 ayat (1) huruf b' Pasal 38 huruf ; Pasal 40 huruf c. Pasal 68 ayat (1)</p>
PMDN No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah	<p>Kepala daerah bertugas melaksanakan:</p> <p>a. Pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di daerah;</p> <p>b. Pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia;</p> <p>c. Sosialisasi penggunaan bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;</p> <p>d. Sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya di daerah.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala daerah:</p> <p>a. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam pengutamaan penggunaan bahasa Negara atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi di daerah.</p> <p>b. Menerbitkan petunjuk kepada seluruh aparatur di daerah dalam menerbitkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara.</p> <p>c. Memberikan fasilitas untuk pelestarian & pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah.</p> <p>d. Bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.</p> <p>Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah/ Negara, dan/atau lembaga non pemerintah.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pasal 4</p>
PMDN No. 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan	<p>“Literasi” menjadi salah satu “Bukti Keterampilan” untuk mendemonstrasikan kompetensi dalam Standar Kompetensi Pemerintahan.</p>	<p>Lampiran: IV. Standar Kompetensi Pemerintahan</p>
PMPK No. 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia	<p>a. sebagai dampak kemajuan iptek dan seni, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan semakin luas;</p> <p>b. untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara, perlu menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;</p> <p>Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia secara baik dan benar.</p>	<p>Konsideran Menimbang</p> <p>Pasal 1 ayat (1)</p>

Sumber: Berbagai Sumber Data diolah 2018.

Berdasarkan penelusuran data, hanya ada 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan lugas mengatur tentang literasi. Penyebutan kata literasi juga diungkapkan secara eksplisit sebagaimana tertera pada UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Bila mencermati Konsideran Menimbang khususnya pada huruf b, tertera kata-kata “membangun dan meningkatkan budaya literasi”. Penggalan kalimat tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun UU tentang Sistem Perbukuan. Demikian pula ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menuliskan pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 4 huruf c, mengatur tujuan penyelenggaraan Sistem Perbukuan, salah satunya ialah menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia.

Prakondisi penguatan literasi harus didukung regulasi/kebijakan yang berkualitas (Saksiono 2016). Demikian pula eksistensi literasi yang didukung UU Sistem Perbukuan. Pengaturannya berupa: kewenangan, siapa melakukan apa (*who does what*), termasuk peran yang dapat dilakukan oleh setiap pihak. Kewenangan Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, yaitu: menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi. Hal ini menandakan kewenangan Pemerintah lebih difokuskan perannya sebagai regulator pada tataran kebijakan secara makro termasuk instrumen pelaksanaannya agar dapat mengakselerasi pengembangan budaya literasi di Indonesia.

Berbeda dengan kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur adalah mengembangkan budaya literasi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf d. Selain berstatus kepala daerah, Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Eksistensi Gubernur memposisikan pemda provinsi sebagai perumus kebijakan merso dengan kewenangan

menyusun/mengimplementasikan kebijakan pengembangan budaya literasi di wilayah provinsi.

Kewenangan pemda Kabupaten/Kota mengelola literasi diatur Pasal 40 huruf c, yaitu: memfasilitasi pengembangan budaya literasi. Kata “memfasilitasi” diartikan keikutsertaan langsung dalam penyelenggaraan aktivitas literasi. Tujuannya pemberdayaan, penguatan kapasitas, bimbingan teknis kepada pemangku kepentingan literasi, ASN, dan masyarakat agar memiliki keterampilan dan mampu berkontribusi nyata untuk pengembangan budaya literasi. Kewenangan ini menyatakan bahwa pemda kabupaten/kota memiliki mandat merumuskan kebijakan, merencanakan program/kegiatan, menetapkan alokasi anggaran, mengembangkan budaya literasi secara kolaboratif, dan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi atas pengembangan budaya literasi secara berkala.

Partisipasi masyarakat di bidang literasi ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1), bahwa masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan. Peran aktif masyarakat dapat berupa penyampaian aspirasi, turut menyelenggarakan aneka aktivitas literasi, menjadi pegiat literasi, berkontribusi dalam forum konsultasi publik penyusunan perda tentang literasi, dan memastikan terselenggaranya pengembangan budaya literasi. Berperan aktif adalah pernyataan sikap yang didasari prinsip sukarela, komitmen, niat tulus, dan kesungguhan, serta tidak sekedar formalitas dalam penyampaian kebutuhan dan kepentingannya berliterasi. Literasi melancarkan siklus manajemen pengetahuan, sehingga terjadi penciptaan, pendistribusian, penggunaan, dan pengelolaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara tepat, benar, dan berkesinambungan. Masyarakat dalam hal ini adalah mereka yang menerima manfaat literasi termasuk para pihak yang berkepentingan.

Literacy Hub (L-hub) sebagai Strategi Keaksaraan Pemda

Orientasi pengembangan budaya literasi dapat diarahkan untuk mewujudkan “Kota Literasi”. Kota Literasi merupakan *city branding* yang mampu meningkatkan kepariwisataan daerah (Saksono 2018). Pengelolaannya mensyaratkan kolaborasi antara pemda dengan berbagai pihak yang peduli literasi. Setidaknya terdapat 2 (dua) agenda utama dalam investasi literasi. Pemda sebagai regulator wajib untuk: 1) memformulasikan regulasi/kebijakan berupa perda dan/atau perkara untuk penguatan dan pengembangan budaya literasi; 2) mengalokasikan anggaran program/kegiatan pengembangan budaya literasi; 3) membentuk Tim Literasi Daerah (TLD); 4) meningkatkan kapasitas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan *critical thinking*, *problems solving*, dan *development of innovation-based literacy culture*; 5) menggagas Waktu Membaca bagi masyarakat di malam hari dan bagi siswa selama 30 menit per hari sebelum memulai aktivitasnya di sekolah; 6) meningkatkan keterampilan membaca dan memotivasi siswa agar menyemarakkan budaya membaca; 7) menetapkan Sekolah Model Literasi setiap jenjang pendidikan (sesuai kewenangan penyelenggaraan pendidikan); 8) mendorong penyelenggaraan maupun penyebarluasan TBM; dan 9) melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan penerbit buku (*book publisher*), institusi/ lembaga donor yang senantiasa berbagi bahan bacaan dan/atau mendonasikan buku secara berkala.

Selanjutnya adalah memapankan pelebagaan *Literacy Hub (L-Hub)* sebagai institusi pemikir. Wadah ini merupakan pusat literasi terintegrasi habitus literasi yang dibentuk untuk kepentingan literasi di era digital. Sebagai habitus literasi, L-Hub merupakan sarana pertemuan *online/offline* yang memadukan gaya hidup, norma, etika, struktur, dan kultur individual maupun sosial. Saksono (2019) menegaskan bahwa pada era digital, kehadiran institusi pemikir menjadi poros transformasi kelembagaan daerah menuju perangkat daerah modern-futuristik

Kehadirannya mampu menciptakan profesionalisme, generasi literat, dan kompetensi personal. Pasca pelebagaan L-Hub beroperasi mapan (*established*), barulah L-Hub menjalin kemitraan dengan pemda untuk mengembangkan budaya literasi. Tata kelola dan pengembangan jejaring L-Hub menjadi tanggung jawab seluruh anggotanya secara kolektif untuk merawat, mengembangkan, dan menjamin keberlanjutannya. Keanggotaan L-Hub bersifat kolektif-kolegial dengan kemitraan sukarela. Anggota L-Hub adalah pemangku kepentingan literasi, yakni: 1) literat; 2) para pegiat literasi; 3) komunitas literasi; 4) jurnalis media cetak/elektronik; 5) peneliti; 6) praktisi; 7) pustakawan; 8) guru/ dosen; 9) siswa/mahasiswa; 10) budayawan/sastrawan; 11) pengarang/penulis buku; 12) lembaga swadaya masyarakat (LSM); 13) pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 14) penerbit/distributor buku dan organisasi perbukuan; 15) Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa; 16) kreator/inovator; dan 17) masyarakat yang memiliki *habbit* membaca buku dan selaku penerima manfaat literasi.

Kedua agenda tersebut adalah *extraordinary strategy* pengembangan budaya literasi di daerah. Kolaborasi antarperangkat daerah Kota Baubau menjadi kunci sukses pengembangan budaya literasi. Kolaborator perangkat daerah dimaksud adalah: a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; c) Dinas Komunikasi dan Informatika; d) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kolaborasi internal pemda idealnya diikuti dengan membangun jejaring (*networked*) literasi melalui kemitraan strategis. Para mitra strategis literasi antara lain: perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat, lembaga donor, dan lain-lain. Beberapa perguruan tinggi yang memiliki kampus di Kota Baubau diantaranya: a) Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan); b) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau; c) Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) Kota Baubau; d) Akademi Manajemen

Informatika dan Komputer (AMIK) Milan Dharma Baubau; e) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES IST) Buton; (f) Politeknik Baubau; g) Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Nusantara Buton; dan h) Universitas Terbuka (UT) Baubau.

Selain perguruan tinggi, terdapat pula beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan nonformal. Salah satu diantaranya adalah Sekolah Jelajah Dunia (SJD) yang didirikan Suhardiyanto pada Oktober 2018 di Kota Baubau. SJD adalah sekolah nonformal berbasis komunitas. Materi pembelajaran SJD terkait dengan motivasi diri siswa, meningkatkan kemampuan imajinasi, melatih menulis untuk mengabadikan gagasan dan sebagai sarana berbagi perasaan, cara belajar sehat dan bahagia, kuliah gratis di luar negeri, *care and share*, donasi ilmu, Taman Baca Milenial (terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), pendidikan dan kehidupan, pengenalan matematika, konselor keluarga, kelas *video call* di bidang arsitek dan kreativitas, kelas telekonferensi, lomba masak bersama mama, mengelola emosi, apresiasi Hari Ibu, dan pengenalan budaya, serta berbagai aktivitas literasi lainnya.

Secara umum, Program Jelajah Literasi berhasil membuat perubahan fundamental terhadap diri siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat belajar, tidak monoton dan kaku, serta aktivitas kelas dapat diikuti kapan saja dan dimana saja sepanjang para siswanya menggenggam gawai. Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman, memiliki nilai estetis dan menyenangkan (*entertain*) serta sepanjang masa (*all the time*) karena setiap aktivitas pembelajaran senantiasa diliput, direkam & disimpan (*recorded*), dan dipublikasikan melalui berbagai media sosial. Inilah yang dimaknai sebagai literasi milenial (*millennial literacy*). Kehadiran SJD menjadi salah satu solusi untuk menyosialisasikan literasi. Sosialisasi literasi penting untuk menggerakkan motivasi internal masyarakat, dimana konten disajikan melalui media secara holistik baik berupa audio, visual, dan kinestetik dengan melibatkan kehadiran teknologi yang menarik, etis, mudah dijangkau, dan memiliki nilai serta

kemanfaatan yang tinggi.

Kota Baubau yang terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak menghalangi dinamika berliterasi di daerah. Kehadiran internet dan gawai (*gadget*) berhasil menggeser peran sejumlah media literasi. Melalui internet dan gawai, penyelenggaraan literasi menjadi lebih mudah, dinamis, dan semakin praktis. Begitu pula kehadiran *literacy hub* dan *cloud literacy* yang merubah paradigma berliterasi. *Cloud literacy* adalah aplikasi pembelajaran yang memiliki beragam konten, tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan, dan dapat diakses dan diunduh dengan mudah melalui gawai. *Cloud literacy* merupakan tata kelola literasi futuristik yang bergantung kepada internet, saling terkoneksi-berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan literasi. *Cloud literacy* mengelola jasa konsultasi *online* sebagai solusi problema literasi, menyediakan beragam buku digital, memberi pelatihan dan praktek peningkatan keterampilan berliterasi, dan membangun komunikasi antarsekolah/perguruan tinggi, antarsiswa/mahasiswa, antarguru/dosen, dan antarpegiat literasi yang terintegrasi dalam *big data*. Ketika tiba saatnya, pemda Kota Baubau dapat melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*), mempersiapkan kota literasi, dan mendeklarasikan Kota Baubau sebagai Kota Literasi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Literasi sebagai tradisi, gaya hidup, dan budaya masyarakat adalah keniscayaan bila diinisiasi awal oleh Pemerintah bersama-sama seluruh pemda dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Pengembangan budaya literasi menuntut kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam suatu gerakan literasi secara kolektif, terstruktur, dan massif di seluruh Indonesia demi terciptanya budaya literasi dan tercapainya tujuan literasi.

Penataan kembali manajemen literasi berimplikasi terhadap percepatan pengembangan budaya literasi, sehingga mampu menciptakan generasi literat yang kreatif, inovatif, produktif, berintegritas,

dan adaptif terhadap perubahan lingkungannya. Pengembangan budaya literasi menjadi semakin optimal ketika setiap pemda memiliki regulasi/kebijakan yang mengatur tata kelola dan budaya literasi. *Literacy Hub* sebagai media komunikasi antarpemangku kepentingan literasi berperan strategis meningkatkan kualitas literasi dan penciptaan generasi literat yang bermanfaat memajukan pembangunan dan daya saing daerah serta peningkatan kesejahteraan.

Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan pembinaan melalui formulasi peraturan daerah tentang Budaya Literasi serta menstimulasi minat baca masyarakat melalui penggunaan sistem aplikasi berliterasi yang dapat diunduh gratis dari perangkat telepon pintar. Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Baubau menyusun kebijakan tentang Budaya Literasi, mewajibkan membaca buku literatur (non teks pelajaran) demi kukuhnya budaya literasi, menggagas “Pojok Baca” (*Reading Corner*) dan/atau “Perpustakaan Kelas” (*Classroom Library*) pada semua jenjang Pendidikan, menyelenggarakan pameran buku/bedah buku/bercerita (*story telling*) secara berkala, menginisiasi perpustakaan digital di Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Sekolah, menghimbau TBM melakukan “Registrasi Taman Bacaan Masyarakat” ke alamat (donasibuku@kemdikbud.go.id) untuk mendapat bantuan pengembangan literasi/Donasi Buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi guru/siswa melalui kerjasama dengan koran lokal dan memberi penghargaan (*awards*) berupa Piagam/Sertifikat dan Dana Stimulan, disertai publikasi karyanya. Para pemerhati, pegiat, pemangku kepentingan literasi, dan masyarakat agar secara mutualistis mendorong perubahan *mindset* dan *culture set*, sehingga literasi benar-benar menjadi gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat urban di Kota Baubau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas pemikiran dan fasilitasnya, khususnya bapak Mustafa Zain, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Kota Baubau, ibu Aini Abdul, *Founder* Ransel Buku Kota Palangka Raya, bapak Suhardiyanto (Anton), *Founder* Sekolah Jelajah Dunia (SJD) Kota Baubau, dan bapak La Ode Muhammad Ishaq Anshari (Iwan), *Founder* Baubau Creative Forum (BBCF).

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Siti. 2010. “Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Faktor Budaya Dengan Kejadian Diare Pada Anak Balita Di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo”. *Prosiding Seminar Nasional Unimus 2010*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018. <http://jurnal.unimus.ac.id>. 91-97.
- Antoro, Billy. 2017. *Gerakan Literasi Sekolah: Dari Pucuk Hingga Akar - Sebuah Refleksi*. Cetakan 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Apriani, Eka. 2016. “A New Literacy: The Role of Technology to Develop Student’s Character”. *Ta’dib Journal of Islami Education*. Vol. 21 (No 1): 59-72.
- Apurines, Muh. Ide. 2018. “Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi”. *Jurnal TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*. Vol. 14 (No. 02): 20-47.
- Badan Pusat Statistik. 2018. “*Statistik Indonesia – Statistical Yearbook of Indonesia 2018*”. Badan Pusat Statistik (BPS). Jakarta: CV. Dharmaputra.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2018. “*Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka – Sulawesi*

- Tenggara Province in Figures 2018*". Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2017. "*Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka – Sulawesi Tenggara Province in Figures 2017*". Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2016. "*Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka – Sulawesi Tenggara Province in Figures 2016*". Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2015. "*Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka – Sulawesi Tenggara Province in Figures 2015*". Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2014. "*Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka – Sulawesi Tenggara Province in Figures 2014*". Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2013. "*Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka – Sulawesi Tenggara Province in Figures 2013*". Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara: Kendari.
- BPS Kota Baubau. 2018. "*Kota Baubau Dalam Angka – Baubau Municipality in Figures 2018*". Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau: Baubau.
- BPS Kota Baubau. 2017. "*Kota Baubau Dalam Angka – Baubau Municipality in Figures 2017*". Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau: Baubau: UD. Syahid.
- BPS Kota Baubau. 2016. "*Kota Baubau Dalam Angka – Baubau Municipality in Figures 2016*". Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau: Baubau: UD. Syahid.
- BPS Kota Baubau. 2015. "*Kota Baubau Dalam Angka – Baubau Municipality in Figures 2015*". Baubau: UD. Syahid.
- BPS Kota Baubau. 2014. "*Kota Baubau Dalam Angka – Baubau Municipality in Figures 2014*". Baubau: UD. Syahid.
- BPS Kota Baubau. 2013. "*Kota Baubau Dalam Angka – Baubau Municipality in Figures 2013*". Baubau: UD. Syahid.
- Bouyardane, Nadja. 2018. "*Literacy Management – Unternehmen Brauchen Schreibkompetenz*". Business-Schreibkurse. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018. <https://www.business-schreibkurse.de/literacy-management-unternehmen-brauchen-schreibkompetenz/>
- Burton, James. 2018. "*List of Countries By Literacy Rate*". Diakses pada tanggal 22 Desember 2018. <https://www.worldatlas.com/articles/the-highest-literacy-rates-in-the-world.html>,
- Gilbert, Lisa., Anne Teravainen, Christina Clark, and Sophia Shaw. 2018. "*Literacy and Life Expectancy: An Evidence Review Exploring the Link Between Literacy and Life Expectancy in England Through Health and Socioeconomic Factors*". February 2018. Diakses pada tanggal 18 Maret 2019. www.literacytrust.org.uk.
- Gustini, Neng., Dede Rohaniawati, dan Anugrah Imani. 2016. "*Budaya Literasi (Model Pengembangan Budaya Baca Tulis Berbasis Kecerdasan Majemuk Melalui*

- Tutor Sebaya*)". Edisi I. Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayatun, Maria I., Liliany Sigit SA., Altrerosye Asri, dan Rully Damayanti. 2010. "*Dari Buton dan Untuk Buton: Malige Budaya Buton*". Usulan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Benteng Istana Buton, Surabaya: Tim Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen (FTSP UK) Petra Surabaya.
- Ilyas, Husnul Fahimah. 2018. "Sepenggal Warisan Tertulis Di Negeri Buton". *Jurnal Pusaka*. Vol. 5 (No. 1): 125-139.
- Inglehart, Ronald F. 2018. "*Cultural Evolution: People's Motivations Are Changing, and Reshaping the World*". First Published. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Noor, Juliansyah. 2013. "*Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*". Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2018. "*PISA 2015 – PISA Results in Focus*". OECD.
- Purwanto, Muhammad Roy., Sularno, dan Eva Fadhilah. 2018. "Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh, dan Tasawuf Dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton". Prosiding Seminar Nasional Seri 8. Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari. *Diseminasi Hasil-hasil Penelitian*. 202-214. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11448>
- Romadhianti, Rona. 2018. "Menembus Cakrawala Dengan Kunci "L". *Prosiding Pekan Seminar Nasional (Pesona) 2018*. 67-71.
- Saksono, Herie. 2012. "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah". *Jurnal Bina Praja*. Vol. 4 (No. 2): 93-104.
- Saksono, Herie. 2013. "Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan – Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas". *Jurnal Bina Praja*. Vol. 5 (No. 1): 1-12.
- Saksono, Herie. 2016. "Wajah Baru Otonomi Daerah: Status Kinerja versus Kondisi Realistis di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan". *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Vol. 11 (No. 2): 133-148.
- Saksono, Herie. 2019. "Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebagai Think Tanks dan Akselerator Perubahan Peradaban di Era Digital". *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Vol. 14 (No. 1): 1-18.
- Sidauruk, Rosmawaty., dan Herie Saksono. 2018. "Ekonomi Kreatif Sebagai Basis *City Branding* Menuju Kepariwisata Terintegrasi Di Kawasan Danau Toba". *Inovasi*. Vol. 15 (No. 1): 83-104. DOI: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.95>
- Tim Visi Yustisia. 2015. "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*". Cetakan 1. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.
- UNESCO Institute for Statistics. 2016. "*Education and Literacy. Browse by Country – Indonesia*". Diakses pada tanggal 22 Desember 2018. <https://en.unesco.org/countries/indonesia>